

## **Penerapan Tugas Utama Dan Fungsi Komisi E DPRD Sumut Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara**

**Aprilia Herlin**

<sup>1</sup>Ilmu Kesejahteraan Sosial, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

*apriaherlin@gmail.com*

### **Abstrak**

*Sebagai seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Dimana penelitian melihat bahwa permasalahan di Komisi E DPRD SUMUT kurang efektif karena dalam melaksanakan program-program yang dijalankan tidak dapat mendorong pelayanan publik yang baik sehingga tidak optimal dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Dan kegiatan ini wawancara dilakukan dengan lima narasumber. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat menginginkan dan mengharapkan bahwa Anggota DPRD Komisi E lebih memperhatikan dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara.*

**Kata Kunci** : DPRD, Pembangunan, Kesejahteraan sosial.

## 1. PENDAHULUAN

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. fungsi legislasi, merancang kebijakan kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan standar. Fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat sasaran, efisien jumlah maupun waktunya. fungsi pengawasan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga semestinya setara dalam hal tanggungjawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Memahami peranan DPRD yang sangat strategis, menimbulkan harapan yang besar dari masyarakat agar para wakil rakyat yang terpilih untuk periode saat ini (2019–2024) dapat menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat, melaksanakan tanggungjawab dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, dimana salah satu indikatornya adalah perbaikan pelayanan publik dasar berbasis standar. Bagaimana memahami permasalahan- permasalahan tersebut dapat membantu DPRD, Pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang ingin menerapkan tata kelola yang baik, khususnya dalam meningkatkan kapasitas DPRD dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berstandar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara.

Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2) Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan menurut (Badan Pusat Statistik Indonesia 2007) suatu kondisi dimanaseluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhisesuai dengan tingkat hidup.

Dari data yang di jumpai, beberapa indikator diatas merupakan pengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan di Sumatera Utara. Dengan tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran yang mengalami sedikit penurunan, Harapan Sekolah yang mengalami kenaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan. Dan beberapa indikator- indikator pendukung lainnya dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menanggulangi beberapa indikator penting diatas dalam pembangunan kesejahteraan di Sumatera Utara.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepentingan masyarakat di Sumatera Utara, ini merupakan salah satu masalah yang klasik

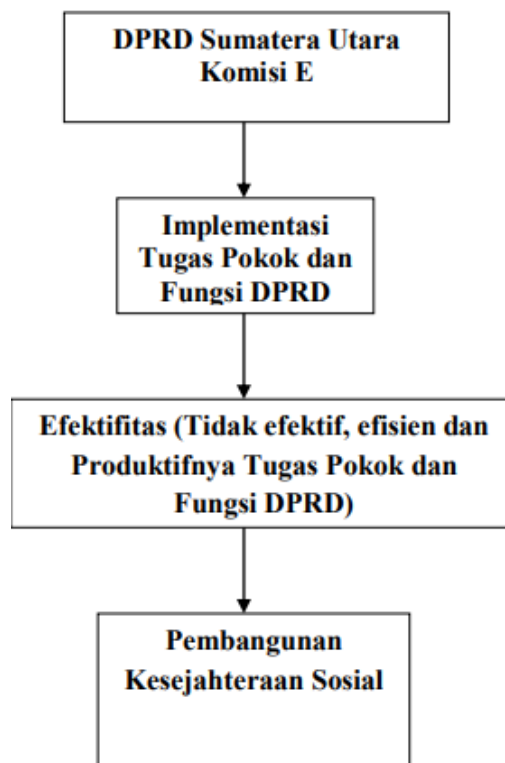
yang harus diperhatikan para stakeholder di Sumatera Utara untuk lebih mengakselerasikan kebutuhan masyarakat ini untuk membuat suatu peraturan yang dapat menguntungkan dan sesuai dengan tingkat penghasilan bagi masyarakat Sumatera Utara. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas,2000).

Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif, dengan melihat dan melakukan penelitian dengan lokasi yang telah ditentukan dengan mengkaji dan menganalisis sesuai dengan fakta yang di temukan di lokasi penelitian. Disamping itu, dengan melakukan observasi penelitian ini juga mengelola data sekunder guna menjadikan validitas data yang dibutuhkan. Metode ini biasanya melakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini ialah :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### 3. HASIL

#### Gambaran Umum DPRD Sumatera Utara

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota – anggotanya berasal dari masing – masing sub propinsi terdahulu. Dengan Undang – Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli. Sebagai Pelaksanaan Undang – Undang No. 10 / 1974 dan Undang – Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 / 1948. Maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas – tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan. Adapun Komisi-Komisi di DPRD Provinsi Sumatera Utara terbentuk 5 Komisi yang membidangi masing-masing diantaranya Komisi A bidang Pemerintahan, Komisi B bidang Perekonomian, Komisi C bidang Keuangan, Komisi D bidang Pembangunan, Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat.

#### Tugas Pokok

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

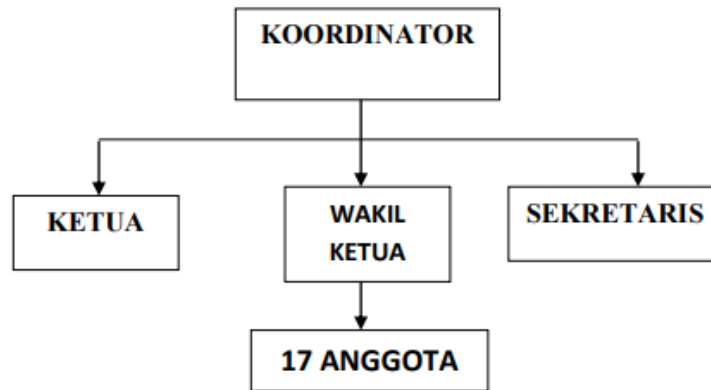
- a) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah.
- b) Membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan bersama.
- c) Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- d) Mengusulkan pendapat dan pertimbangan kepala daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- e) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- f) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
- g) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur.

#### Fungsi DPRD

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi antarlain:

- a) Legislasi merupakan wujud dalam membuat peraturan-peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b) Anggaran merupakan wujud dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- c) Pengawasan merupakan wujud dalam bentuk pengawasan atau controlling terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Undang Undang dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Susunan Kepengurusan Komisi E



Gambar 2. Struktur Organisasi Komisi E

#### 4. PEMBAHASAN

##### Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwasannya dalam pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatra Utara ini tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi sebagai DPRD itu sendiri yang mempunyai 3 Fungsi.

Setelah dijalankan program menyetujui RAPBD menjadi APBD dan disusun kembali oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan SKPD terkait, maka selanjutnya pemerintah Provinsi dan SKPD bertanggungjawab kepada DPRD untuk di Audit dalam proses Anggaran. Seperti program pelayanan kesehatan dan keolahragaan untuk Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara. Menurut Bapak Ikrimah hal yang paling penting diperhatikan oleh pemerintah Provinsi, SKPD dan DPRD dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ialah memperhatikan sarana dan prasarana yang menjadi tanggungjawab Provinsi Sumatera Utara ialah sekolah tingkat menengah seperti: SMA, SMK, STM, dan lain-lain. Selanjutnya SD dan SMP merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah wilayah kabupaten atau kota.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP. selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT Beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatra Utara ini penyelesaiannya harus komprehensif, tidak hanya di sektor tertentu saja tetapi pentingnya di sektor pelayanan publik, sektor infrastruktur, sektor pendidikan, bantuan-bantuan tunai untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dilakukan oleh dinas sosial saja yang menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial ini.

Dalam proses legislasi program-program yang dijalankan pemerintah belum dapat dikatakan berhasil, sebab masih banyak informasi dan temuan di lapangan. Masih banyak informasi-informasi bahwa ada pungli-pungli. Misal ada Gratifikasi seperti kasus Bansos atau bantuan sosial di Sumatera Utara yang ada melibatkan anggota DPRD dan SKPD di Sumatera Utara di tahun 2015-2016. Oleh karena itu belum bisa mengatakan bahwa program pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu berhasil.

Kemudian juga percepatan pembangunan, khususnya menurunkan angka sektor kemiskinan tidak signifikan, tapi boleh juga diaspresiasikan karna ada juga keberhasilan-keberhasilan atau ada peningkatan peningkatan tapi dengan kekurangannya anggaran masih banyak hal yang harus diperbaiki di Provinsi Sumatera Utara ini. Seperti infrastruktur masih banyak yang rusak, jalan yang perbaikan dikarenakan oleh faktor pada tahun 2014-2016.

#### Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwa Pengawasan yang dilakukan Komisi E DPRD Setelah di Implementasikan Tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya sistem pengawasan dilapangan terkait program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Komisi E mengundang dinas-dinas terkait, yaitu dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan dan lain-lain untuk di paparkan program masing-masing.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP. selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwa Pengawasan yang dilakukan Komisi E DPRD setelah dilakukan dan dilaksanakannya Implementasikan Tugas Pokok dan Fungsi anggaran dewan Komisi E dalam pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat, maka upaya yang dilakukan selanjutnya ialah melakukan controlling di daerah-daerah yang menjadi wilayah reses. Seperti wilayah medan-tebing tinggi pembangunan jalan tol, pembangunan Andenpass ( H. Nasution Medan), Danau toba simalungun dan wilayah lainnya di Sumatera Utara. Selanjutnya perlu ditegaskan dan bantuan dari pakar dan praktisi bidang sosial seperti gender dan anak praktisi wanita dan perencanaan infrastruktur fakar perencanaan ( Development Planner). Instrumen yang dapat digunakan yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

#### Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD, Beliau mengatakan bahwa bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai DPRD baik dalam proses legislasi, pengawasan dan penganggaran, hal yang dilakukan berdasarkan hasil tersebut, sehingga program tersebut dapat teralikatif dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT, Beliau mengatakan bahwa mengimplementasikan program tugas pokok dan fungsi DPRD SUMUT untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan bantuan langsung seperti banjir di dua daerah yaitu daerah sinabung dan karo. Selain memberikan bantuan langsung Komisi E DPRD di bidang sosial juga memberikan pelayanan infrastruktur dan kesehatan yang baik dan terjamin.

Pertanggungjawaban yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT setelah diimplementasikan Program Tugas Pokok dan Fungsi DPRD SUMUT serta sistem pertanggungjawabannya dengan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial itu tidak hanya dengan bantuan-bantuan langsung tapi dengan memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, memberikan pelayanan infrastruktur, kesehatan. Makadari itu dengan perlahan akan meningkat kesejahteraan.

### Pembangunan Kesejahteraan Sosial Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwasannya bentuk Partisipasi yang dilakukan Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ialah meningkatkan taraf hidup dengan pendidikan dan pekerjaan, diantaranya rata-rata masyarakat harus dapat memiliki aktivitas dari pemerintah yang layak, sehingga tidak dapat terjadi penganggurana di Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwasannya bentuk Partisipasi yang dilakukan Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ialah meningkatkan taraf hidup dengan pendidikan dan pekerjaan, diantaranya rata-rata masyarakat harus dapat memiliki aktivitas dari pemerintah yang layak, sehingga tidak dapat terjadi penganggurana di Sumatera Utara.

### Sistem Pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwasannya Pemberdayaan Masyarakat Komisi E DPRD SUMUT dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara itu Ada, salah satu contohnya di program PKH, untuk memperbaiki Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat secara bertahap dan pelan-pelan. Tidak seperti membalikkan kedua telapak tangan, butuh proses dan di perlukan kesabaran dalam membina masyarakat ini khususnya dilapisan masyarakat menengah kebawah yang pendidikan nya kurang untuk bisa sadar sehingga mereka mau mendorong dirinya sendiri supaya lebih maju.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. untuk memperbaiki Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Komisi E DPRD SUMUT dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara Ada, Salah satu faktor untuk dapat meningkatkan sistem pemberdayaan itu sendiri perlu memperbaiki dirinya. Jadi utama dari diri masyarakat itu sendiri. Di bangun kesadaran, di dorong kesadarannya untuk merubah dan memperbaiki dirinya maka disitulah perlunya pendamping-pendamping di Program PKH itu, jangan masyarakat itu diberi bantuan uang lalu ditinggal pergi, uang akan habis sebentar saja. Masyarakat apabila diberi apa pun kalau tidak ada kepedulian terhadap dirinya sendiri maka tidak akan bisa maju karena Pemberdayaan menjadi hal yang sangat penting agar nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa perlu lagi diarahkan atau dituntun oleh Pemerintah atau para agen perubahan.

### Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan bahwasannya Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Kesejahteraan di Sumatera Utara sudah ada ketentuannya berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara. Dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara ialah Penghasilan perkapita, kelayakan konsumsi dan tingkat hunian yang layak huni. Indikator-indikator inilah

yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

Wawancara dengan beberapa diwilayah Sumatera Utara( Masyarakat Medan)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul Badriah, SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area. Beliau mengatakan bahwasannya dalam Program yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara selama ini pengawasan yang dilaksanakan seperti reses yang menerima dan meminta masukkan atas saran dan aspirasi oleh masyarakat dengan waktu yang biasanya tidak tepat berada di lokasi yang sama dengan berlangsung dilaksanakan pada bulan, jam sampai dengan tahun dilaksanakan sekali dalam setahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah Juwaini Prasetya Nasution, SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia. Beliau mengatakan bahwasannya program yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah Juwaini Prasetya Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan bahwasannya Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera ini seperti yang di contohkan dengan pendidikan karena apabila masalah pendidikan sudah baik maka lebih mudah masyarakat untuk dapat bekerja karena mempunyai ilmu yang cukup. Hal tersebut dapat meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara menjadi meningkat dan keburukan-keburukan seperti tindakan kriminal berkurang ketika Pendidikan, Kesehatan-kesehatan sudah bagus, dan lapangan Pekerjaan juga terjamin di Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul Badriah, SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area. Beliau mengatakan bahwasannya bentuk Partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara dengan mempunyai kesadaran akan tanggungjawab atas kondisi di lingkungan sekitar, Merubah pola pikir agar lebih mandiri dalam kehidupan dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah serta inisiatif dalam kondisi memperbaiki kualitas kehidupannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah Juwaini Prasetya Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29 Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan bahwasannya harapan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini yaitu memiliki kesadaran untuk merubah suatu hal yang tidak baik menjadi baik. Kemudian bisa menjadi subjek dan objek untuk pembanguna kesejahteraan itu sendiri. Dengan menjadi subjek pembangunan dituntun agar melakukan pembangunan sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Sedangkan objek Pembangunan, agar menjadi pelaksana pembangunan sebagai pemberian upah dari tanggung jawabnya kemudian harus mengikuti ketentuan yang diberikan.

Wawancara kepada Anggota Partai Politik

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Eka Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan. Beliau mengatakan bahwas Ada Anggota Partai Golkar yang menduduki sebagai Anggota Dewan di Komisi E DPRD SUMUT yaitu Bapak H. Syamsul Bahri Batubara, SH dan Bapak



H. A Yasir Ridho Loebis, SH, ST, MSP Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Bapak Eka Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa saran yang dilakukan Partai dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara yang pertama semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. Ketiga semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Keempat semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang Kelima semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Bapak Eka Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa partai harapkan terhadap Komisi E dalam meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kinerja Komisi E dalam bidangnya untuk terjun secara langsung ke lapangan atau ke masyarakat seperti yang dilakukan anggota dewan DPRD dalam masa reses. Dalam masa reses tersebutlah peningkatan untuk mengetahui aspirasi masyarakat tersebut dalam kekurangan dan kebutuhan masyarakat, terutama untuk dapil mereka masing masing yang telah mereka janjikan

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD SUMUT Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara sudah berjalan dengan semestinya, akan tetapi masih belum maksimal seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Pengawasan serta tanggungjawab yang dilakukan Komisi E DPRD untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibidangnya melalui Program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana namun masih kurang efektif karna masih kurangnya pengawasan dalam setiap program tersebut khususnya untuk Kesehatan dan Pendidikan
3. Pemberdayaan masyarakat untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk maju dan berkembang sehingga tidak ada kesadaran diri sendiri dalam pola berfikir sehingga terjadinya penurunan tingkat Kesejahteraan.
4. Pelaksanaan dalam upaya meningkatkan kinerja komisi e dprd provinsi sumatera utara kedepan yang berdaya guna dan berhasil guna.
5. Upaya yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT dalam Pembangunan Kesejahteraan hanya berfokus pada Pendidikan dan Kesehatan.

## REFERENSI

- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). *Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19)* (Vol. 1). umsu press.
- Agus, E., & Zulfahmi, Z. (2021). Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai Nasionalisme Generasi Muda. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 26-33.
- Agussani, A. (2020). Implementation Analysis of Trans Mebidang Program in Transportation Mode Services, North Sumatera (Comperative Study of Medan City). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1167-1174.

- Agussani, A. (2020). [Paper Kolokium] The Approach to Indonesian Language and Literature Curriculum in the Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.01. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Agussani, A. (2020). Pembinaan Karakter Mahasiswa FISIP UMSU Melalui Pelatihan Soft Skill. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Agussani, A. (2019). STUDENT OPINION REGRADING PRE-MARRIAGE CERTIFICATION POLICY. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 1(1).
- Anshori, A., Sos, S., Kom, M. I., Mahardika, A., Sos, S., MAP, A. S. S. S., ... & Tanjung, Y. (2021). *Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan* (Vol. 1). umsu press.
- Baiduri, R., Khairani, L., & Puspitawati, P. (2019). Multicultural Education Based on North Sumatera Folkloreas a Source of Character Building in Early Childhood.
- Basri, J. K. M. Socio-Political Aspects In The Development Of Astronomy In The Islamic World.
- Hermanto, D., & Akrim, A. (2020). Covid-19 Pandemic: A Social Welfare Perspective. *Soc. Sci. Humanit. J*, 4(5), 1915-1924.
- Hidayat, F. P., Saleh, A., Adhani, A., & Rudianto, R. (2021). PENDIDIKAN LITERASI MEDIA GURU SEKOLAH MIS AL-HIDAYAH DALAM MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF DUNIA DIGITAL PADA SISWA. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 627-633.
- Khairani, L. (2021, March). DINAMIKA KONTESTATIF DALAM REPRODUKSI IDENTITAS BUDAYA JAWA DELI. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 194-203).
- Khairani, L. (2021, February). JAVA DELI (JADEL) WOMEN'S CONTESTATION IN THE STRUCTURE OF THE PATRIARCHY SOCIETY IN THE DELI OF NORTH SUMATERA. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 916-920).
- Khairani, L., Sugara, R., & Khair, H. (2022). Peran Motivasi Dalam Memediasi Pengaruh Pengawasan Dan Budaya Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Honorer Pada Upt Asrama Haji Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 5(1), 42-51.
- Mujahiddin, M., Tanjung, Y., & Augus, E. (2018). Analysis of the Effect of Waste Bank Program on Empowerment of Poor Women in Kelurahan Sicanang Belawan Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(3), 105-113.
- Mujahiddin, M., Tanjung, Y., & Augus, E. (2018). Analysis of the Effect of Waste Bank Program on Empowerment of Poor Women in Kelurahan Sicanang Belawan Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(3), 105-113.
- Mahardika, A., & Mujahiddin, M. (2017). MODEL STRATEGI PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KELUARGA.(Studi Kasus Pada Lima Perempuan Kepala Keluarga Miskin di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Warta Dharmawangsa*, (54).
- Mujahiddin, M., Tanjung, Y., & Nasution, N. (2021). Implications of Local Knowledge Construction in Empowerment Practices of Women's Groups at Batik Liza Mangrove Studio, Pematang Johar Village, Deli Serdang Regency. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 870-878.
- Mujahiddin, M., Tanjung, Y., & Augus, E. (2018). Analysis of the Effect of Waste Bank Program on Empowerment of Poor Women in Kelurahan Sicanang Belawan Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(3), 105-113.
- Mujahiddin, M., & Mahardika, A. (2019). Livelihood Strategy of Poor Female-Headed Households in Basic Household Expenses. *Birci*, 2(1), 17-27.
- Penantoniati, B., & Khairani, L. (2021). *Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata dan Budaya Jakarta Dalam Melestarikan Budaya Betawi* (Doctoral dissertation).

- Rambe, T. (2019). Sejarah Politik dan Keukuasaan (Islam, Nasionalisme dan Komunisme dalam Pusaran Kekuasaan di Indonesia).
- Rambe, T., Lukitoyo, P. S., Saragih, S. N., & Khairani, L. (2019). Sejarah Politik dan Kekuasaan. *Yayasan Kita Menulis*.
- Rimbawati, R., Siregar, Z., & Yusri, M. (2021). PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PEMATANG JOHAR MELALUI USAHA BATIK SAWAH. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 934-943.
- Saleh, A., & Basit, L. (2016). Pengembangan Model Corporate Social Responsibility (CSR) Agincourt Resources Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara. *Prosiding SNHP3M Utara*, 3.
- Saleh, A., Sihombing, M., & Rujiman, A. P. (2016). CSR Model of PT Agincourt Resources for Empowerment and Regional Development in Batangtoru, South Tapanuli, Indonesia. *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences*, 4(9), 17-31.
- Saleh, A., & Tanjung, Y. (2021). Konstruksi Sosial pada Praktik Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Green Economic di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(9), 1511-1524.
- Saputra, S., Tanjung, Y., & Agus, E. (2021). Identity Politics of Veiled Women in Indonesia (Case Study on Niqab Squad Community). *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 2455-2466.
- Saputra, S., & Mujahiddin, M. (2021). Desa Tangguh Covid-19 Melalui Pemberdayaan Kelompok Tani Berbasis Sociopreneurship Di Desa Sekoci Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 3(1).
- Saputra, S., Tanjung, Y., & Agus, E. (2021). Identity Politics of Veiled Women in Indonesia (Case Study on Niqab Squad Community). *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 2455-2466.
- Saputra, S. (2020). Pengemasan Ideologi dalam Gerakan Hijrah: Studi Kasus Gerakan Komunitas Sahabat Hijrahku di Medan. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 4(1), 287-300.
- Saputra, S., Pujiati, P., Simanihuruk, M., Ismail, R., & Sitorus, H. (2020). Gerakan Hijrah Kaum Muda Muslim di Medan (Studi Kasus Gerakan Komunitas Sahabat Hijrahkuu). *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 12(1), 23-37.
- Saputra, S., & Putra, N. RELIGIOUS VOLUNTARISM IN THE YOUTH MUSLIM PHYLANTROPIC MOVEMENT IN MEDAN. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(2).
- Saputra, S., & Mujahiddin, M. (2021). Stimulus Agrosociopreneur Melalui Pengembangan Sistem Refugia dan Lebah Madu Berbasis Pertanian Jeruk di Desa Sekoci Kabupaten Langkat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1689-1700.
- Sihite, M., Nadapdap, K., Gultom, R., & Saleh, A. (2019). Peran Mutu Dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah METHONOMI*, 5(1), 35-48.
- Sihite, M., & Saleh, A. (2019). Peran Kepemimpinan dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi: tinjauan konseptual. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 2(1), 29-44.
- Tanjung, Y., Khairani, L., & Saputra, S. (2021). Women's Group Empowerment Practices: Knowledge Construction Study at The Liza Mangrove Studio in Pematang Johar Village. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 2443-2454.
- Tanjung, Y., & Saputra, S. (2020). Pembentukan Lingkungan Tangguh Covid-19 Berbasis Kelompok Perempuan di Kecamatan Medan Polonia. *JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, 3(2), 239-252.
- Tanjung, Y., & Saputra, S. (2020). Analysis of Understanding of DPR Members against Gender Mainstreaming in DPRD Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 2194-2208.
- Tanjung, Y., Saputra, S., & Hardiyanto, S. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK PEMASARAN PRODUK INOVASI JERUK SIAM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3091-3103.

- Tanjung, Y., Saputra, S., & Hardiyanto, S. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK PEMASARAN PRODUK INOVASI JERUK SIAM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3091-3103.
- Tanjung, Y., & Saputra, S. (2021). Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Pematang Johar, Deli Serdang. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 623-630.
- Tirtayasa, S., Khair, H., & Yusri, M. (2021). Influence of education of entrepreneurship, self efficacy, locus of control and entrepreneurs characters of enterprises (the study case is all the students of private university in Medan). *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 2(2), 53-64.
- Ulayya, A., & Asriwandari, H. (2017). *Respon Ibu Rumah Tangga Terhadap Sampah Plastik Di Perumahan Cipta Lestari I Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Yunita, L., Simorangkir, W., & Saputra, S. (2020). Penguatan Ekonomi Keluarga Berbasis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dengan Metode Keranjang Takakura Pada Ibu Rumah Tangga Kelurahan Glugur Darat I Kota Medan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 1(1), 32-39.
- Yusri, M., & Amrizal, D. (2019, December). Political Education Through the Application of the Abstentions Countermeasure Model by KPUD (Regional Election Commission) Deli Serdang. In 4th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2019) (pp. 650-654). Atlantis Press.
- Yusri, M., Cemda, A. R., & Rangkuti, K. (2022). Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil dalam Pengembangan Wilayah Masyarakat Pedesaan di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 11(3), 834-843.
- Yusri, M., & Syafri, S. (2021). Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia. umsu press.
- Yusri, M. A. (2021). EFEKTIVITAS PENDIDIKAN KESEHATAN DASH (DIETARY APPROACHES TO STOP HYPERTENSION) MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO DAN BOOKLET TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG DASH PADA PASIEN HIPERTENSI (Studi di Dusun Manggis Desa Burneh Wilayah Kerja Puskesmas Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan) (Doctoral dissertation, STIKes Ngudia Husada Madura).
- Yusri, M., Tirtayasa, S., Siregar, M. S., & Kartaatmaja, R. S. (2021). A CONFIRMATORY ANALYSIS OF FOOD SECURITY IN NORTH SUMATERA. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 18(1), 64-64.